

**EVALUASI SISTEM ZONASI DALAM PEMERATAAN KUALITAS
PENDIDIKAN DI KABUPATEN PRINGSEWU
(Studi SMPN 2 Sukoharjo dan SMPN 3 Pringsewu)**

(Skripsi)

Oleh:
**MUTAWAKKIL ABDAN
NPM 1746040124**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada evaluasi sistem zonasi dalam pemerataan kualitas pendidikan di kabupaten Pringsewu, hal ini dikarenakan dalam implementasinya di Kabupaten Pringsewu belum seluruh sekolah menerapkan penerimaan peserta didik baru secara *online*, sehingga masih terdapat sekolah yang belum menerapkan sistem zonasi. Penelitian ini menggunakan teori William Dunn dalam melakukan evaluasi sistem zonasi dalam meningkatkan kualitas Pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran evaluasi penerapan sistem zonasi dalam pemerataan kualitas Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi pada penelitian ini adalah SMP Negeri 2 Sukoharjo dan SMP Negeri 3 Pringsewu. Hasil penelitian ini dengan kriteria evaluasi yang dikemukakan oleh William Dunn ditemukan bahwa dari segi Efektifitas belum efektif dikarenakan sarana dan prasarana yang belum merata, Efisiensi sistem zonasi masih belum dapat dikatakan efisien karena masih terdapat banyak hambatan dari pada manfaat, Kecukupan sistem ini sudah memenuhi indikator kecukupan dengan dukungan data pembagian wilayah dan harapan wali murid akan kebijakan untuk terus diterapkan, Pemerataan belum terpenuhi dikarenakan dari 27 sekolah baru 18 sekolah yang menerapkan sistem, Responsivitas sistem ini memperoleh respon positif, dan dari ketepatan sistem ini dinilai sudah tepat karena memberikan dampak positif kepada calon siswa untuk dapat diterima di sekolah negeri yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Kesimpulan dari penelitian ini 1) Efektifitas belum dapat dikatakan efektif karena secara sarana dan prasarana masih belum merata sehingga para calon siswa masih memilih untuk bersekolah yang jauh asalkan memiliki fasilitas, sarana dan prasarana yang lebih unggul. 2) Efisiensi, masih hanya dari sisi waktu sedangkan dalam penerapan pelaksanaannya masih jauh dari kata efisien dikarenakan banyak wali murid yang tidak cakap teknologi dan internet yang belum merata. 3) Kecukupan; indikator kecukupan PPDB sistem zonasi sudah memenuhi indikator kecukupan dikarenakan dukungan oleh data pembagian zona wilayah dan wali murid yang terus berharap kebijakan ini diterapkan. 4) Pemerataan, sistem zonasi belum merata dikarenakan dari 27 Sekolah Menengah Pertama baru 17 sekolah yang menerapkan PPDB sistem zonasi. 5) Responsivitas dalam penelitian ini indikator responsivitas memperoleh respon yang positif. 6) Ketepatan sistem zonasi telah tepat pelaksanaannya sesuai dengan pasal 13 Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah

Kata Kunci: Evaluasi, Sistem Zonasi, Pemerataan, Kualitas

ABSTRACT

This research is focused on evaluating the zoning system in equalizing the quality of education in Pringsewu Regency, this is because in its implementation in Pringsewu Regency not all schools have implemented online acceptance of new students, so there are still schools that have not implemented the zoning system. This study uses William Dunn's theory in evaluating the zoning system in improving the quality of education at the junior high school level in Pringsewu District. This study aims to obtain an overview of the evaluation of the implementation of the zoning system in equalizing the quality of education at the junior high school level in Pringsewu Regency. This study used a qualitative approach. The data collection techniques used in this study were observation, interviews, and documentation. The locations in this study were SMP Negeri 2 Sukoharjo and SMP Negeri 3 Pringsewu. The results of this study with the evaluation criteria put forward by William Dunn found that in terms of effectiveness it has not been effective because the facilities and infrastructure are not evenly distributed, the efficiency of the zoning system cannot be said to be efficient because there are still many obstacles than the benefits, the adequacy of this system has fulfilled the adequacy indicator with the support of regional distribution data and the expectations of student parents for the policy to continue to be implemented, Equity has not been fulfilled because of the 27 new schools 18 schools have implemented the system, the responsiveness of this system has received a positive response, and from the accuracy of this system it is considered appropriate because it has a positive impact on candidates students to be accepted at public schools that are not far from where they live. The conclusions of this study 1) Effectiveness cannot be said to be effective because in terms of facilities and infrastructure it is still not evenly distributed so that prospective students still choose to go to schools that are far away as long as they have superior facilities and infrastructure. 2) Efficiency, still only in terms of time while the implementation is still far from efficient because many parents are not technologically proficient and the internet is not evenly distributed. 3) Adequacy; the PPDB adequacy indicator for the zoning system has fulfilled the adequacy indicator due to support from data on regional zoning and student parents who continue to hope that this policy will be implemented. 4) Equity, the zoning system is not evenly distributed because of the 27 junior high schools, only 17 schools apply the PPDB zoning system. 5) Responsiveness in this study the responsiveness indicator obtained a positive response. 6) The correct implementation of the zoning system is in accordance with article 13 of the Minister of Education and Culture Number 01 of 2021 concerning Acceptance of New Students in Kindergartens, Elementary Schools, Junior High Schools, High Schools, and Vocational High Schools of at least 50% of the capacity school

Keywords: *Evaluation, Zoning System, Equity, Quality*

**EVALUASI SISTEM ZONASI DALAM PEMERATAAN
KUALITAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN
PRINGSEWU
(Studi SMPN 2 Sukoharjo dan SMPN 3 Pringsewu)**

Oleh

Mutawakkil Abdan

Skripsi

**Sebagai Salah satu Syarat untuk Mencapai Gelar SARJANA
ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **EVALUASI SISTEM ZONASI DALAM PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN PRINGSEWU (Studi SMPN 2 Sukoharjo dan SMPN 3 Pringsewu)**

Nama mahasiswa : **Mutawakkil Abdan**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1746041024

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



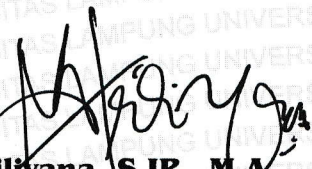
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP
NIP. 19780923 200312 1 001


Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si.
NIP. 19910924 201903 2 019

2. Ketua Jurusan Administrasi Negara

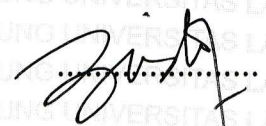

Meiliana, S.IP., MA
NIP. 19740520 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

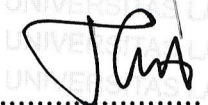
Ketua

: Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP



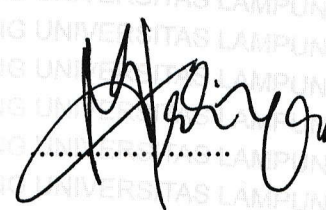
Serketaris

: Vina Kamilasari SPd., M.Si



Penguji Utama

: Meiliyana, SIP., M.A



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si

NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 27 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



Mutawakkil Abdan
NPM 1746041024

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Mutawakkil Abdan, lahir di Pringsewu Lampung 08 Oktober 1999. Penulis merupakan anak Ketiga dari pasangan Bapak Syahrul dan Ibu Erniyati. Pendidikan formal yang ditempuh penulis yakni Sekolah Dasar Muhammadiyah Pringsewu diselesaikan pada tahun 2011, SMP Negeri 3 Pringsewu diselesaikan pada tahun 2014, dan SMA Negeri 2 Pringsewu diselesaikan pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung melalui jalur Paralel dan tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) pada periode 2018/2019. Pada tahun 2020 di pertengahan bulan Januari, penulis melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, Bandar Lampung selama 30 hari, pada bulan Juli 2020 penulis melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Podomoro Kabupaten Pringsewu, Lampung selama 40 Hari

MOTTO

“Jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali.”

(Nelson Mandela)

” “Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan, tanpa pendidikan indonesia tak mungkin bertahan.””

(Najwa Shihab)

“Akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan bagi siapapun, selama orang tersebut mau berusaha dan bekerja keras untuk memaksimalkan kemampuan yang ia miliki.”

(Dan)

SANWACANA



Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Evaluasi Sistem Zonasi Dalam Pemerataan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Pringsewu (Studi SMPN 2 Sukoharjo dan SMPN 3 Pringsewu)”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Negara (S. A. N) di Universitas Lampung. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak sekali kesulitan yang dihadapi dari awal hingga selesai penulisannya. Namun berkat bantuan, bimbingan, dorongan serta saran dari berbagai pihak, segala kesulitan tersebut Alhamdulillah dapat diatasi dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP. , selaku dosen pembimbing utama. Terima kasih pak Eko untuk segala bimbingan, saran serta masukan yang Bapak berikan kepada saya untuk saya dapat memperbaiki skripsi. Seluruh saran dan masukan yang telah pak Eko berikan merupakan sebuah wawasan dan pelajaran baru bagi saya. Semoga keberkahan dan kesehatan selalu melimpahi Bapak.
2. Ibu Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si. , selaku dosen pembimbing kedua. Terima kasih Ibu Vina untuk kesediannya membimbing dan memberikan saya ilmu yang bermanfaat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya. Semoga Ibu senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan dan kebahagiaan.
3. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A, selaku dosen penguji. Terima kasih Ibu Meiliyana untuk dapat mengoreksi skripsi saya dari seminar proposal hingga skripsi ini dapat selesai, memberikan masukan dan tambahan ilmu bagi saya. Semoga keberkahan dan kesehatan selalu melimpahi Bu Meiliyana.
4. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A, selaku dosen pembimbing akademik. Terimakasih ibu telah membimbing saya dari awal perkuliahan hingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan saya. Saran dan masukan dari Ibu sangat membantu saya saat dibangku perkuliahan. Semoga Ibu selalu diberikan keberkahan dan kesehatan.

5. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara, terima kasih atas dedikasi yang diberikan dalam mengajar para mahasiswa, Semoga ilmu bermanfaat yang telah diberikan dapat menjadi sebuah ladang pahala yang terus mengalir seumur hidup Bapak dan Ibu.
8. Seluruh Staf Ilmu Administrasi Negara terutama Mba Wulan, terima kasih untuk selalu membantu mengurus berbagai keperluan administrasi dari awal mahasiswa baru hingga saya lulus.
9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu (Pak Heri Iswahyudi, Bu Jamilah, Bu Noviana, Bu Muryati, Pak Iswanto serta seluruh pegawai di Bidang Pendidikan), terima kasih sudah menerima saya dengan baik serta membantu dalam memperoleh data saat penyusunan skripsi hingga selesai. Semoga kebaikan Bapak dan Ibu di balas dengan lebih baik oleh Allah SWT.
10. Sekolah SMP N 2 Sukoharjo dan SMPN 3 Pringsewu (Pak Dian, Bu Sariana, Bu Risnawati, Bu Erni, Bu Ambarita, Pak Yoga serta seluruh guru yang ada di sekolah SMPN 2 Sukoharjo dan SMPN 3 Pringsewu), terima kasih sudah menerima saya dengan baik dan serta membantu dalam memperoleh data saat penyusunan skripsi hingga selesai. Semoga kebaikan Bapak dan Ibu di balas dengan lebih baik oleh Allah SWT.
11. Ayah dan Mamah. Terimakasih Ayah dan Mamah udah selalu sabar dengan Abdan. Abdan janji suatu saat nanti bisa banggain Ayah dan Mamah.
12. Abang dan Mba , dan seluruh keluarga. Terimakasih untuk segala bentuk doa, dukungannya serta saran yang diberikan sehingga Abdan dapat menyelesaikan pendidikan sampai di bangku perkuliahan.
13. Terimakasih untuk teman-teman Kiyay Fisip yang telah membantu saya selama saya duduk di bangku perkuliahan.
14. Teman-teman Angkatan ANGKASA terutama kelas Pararel, terima kasih untuk moment kebersamaan selama kurang lebih 5 lima tahun ini, semoga kita semua dapat menggapai cita-cita yang kita inginkan dan dapat bermanfaat bagi semua orang.
15. Serta seluruh pihak yang membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi tanpa terkecuali, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
16. Terimakasih keluargaku tercinta.

Akhir kata, penulis meminta maaf atas segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran agar karya tulis ini selanjutnya dapat lebih baik lagi. Penulis berharap semoga Allah Subhawahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan bagi kalian dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Aamiin.

Bandar Lampung, 27 Juni 2023

Penulis

Mutawakkil Abdan

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	ii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Evaluasi Kebijakan Publik	10
2.3 Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi	20
2.3.1 Program Zonasi	22
2.4 Kerangka Pikir	25
III. METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Fokus Penelitian	27
3.3 Lokasi Penelitian	29
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.4.1 Jenis Data	30
3.4.2 Sumber Data.....	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6 Teknik Analisis Data	34
3.7 Teknik Keabsahab Data	36
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39

4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
4.1.1	SMP Negeri 2 Sukoharjo	39
4.1.2	SMP Negeri 3 Pringsewu	41
4.2	Hasil Penelitian.....	43
4.3	Pembahasan.....	58
V.	SIMPULAN DAN SARAN.....	68
5.1	Simpulan	68
5.2	Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kebijakan Permendikbud Sebelum dan Sesudah di Perbarui	3
Tabel 1. 2 Data Jumlah Penerimaan Siswa Jalur Zonasi Tahun 2022	5
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 3. 1 Data Informan	31
Tabel 3. 2 Data Dokumen-Dokumen.....	32
Tabel 4. 1 Pengaturan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Kabupaten Pringsewu Tahun Pelajaran 2021/2022	47
Tabel 4. 2 Jumlah Siswa di SMP Negeri 2 Sukoharjo dan SMP Negeri 3 Pringsewu Januari 2022	48
Tabel 4. 3 Data Sekolah Yang Menerapkan Sistem Zonasi Dalam PPDB Secara Daring.....	53
Tabel 4. 4 Siswa Berdasarkan Jalur Penerimaan Masuk Sekolah Tahun Ajaran 2021/2022.....	56
Tabel 4. 5 Matriks Penelitian	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Evaluasi Model CIPP.....	19
Gambar 2. 2 Kerangka Fikir.....	26
Gambar 3. 1 Komponen dalam Analisis Data Kualitatif/Model Interaktif.....	36
Gambar 4. 1 Fasilitas Pendidikan Di SMP N 3 Pringsewu.....	45
Gambar 4. 2 Fasilitas Pendidikan di SMP N 2 Sukoharjo.....	46
Gambar 4. 3 Media Berita Terkait PPDB Di Kabupaten Pringsewu Tahun 2021	50

DAFTAR SINGKATAN

CPDB	: Calon Peserta Didik Baru
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
PPDB	: Penerimaan Peserta Didik Baru
Permendikbud	: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
SD	: Sekolah Dasar
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
TK	: Taman Kanak-Kanak

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah hak segala bangsa sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi ‘Setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan’. Maka pemerintah berkewajiban memenuhi hak warga negaranya dalam memperoleh pendidikan untuk menentukan kualitas hidup kedepan suatu bangsa. Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa dan sebagai bekal dalam menghadapi perkembangan zaman dalam setiap prosesnya. Pendidikan di negara ini telah menjadi salah satu perhatian khusus untuk dilihat bagaimana akses pemerataannya agar dapat dinikmati oleh semua warga diseluruh Indonesia.

Proses pelaksanaan akses pemerataan pendidikan terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, kesempatan untuk memperoleh pendidikan yaitu akses pendidikan bisa dinikmati oleh semua penduduk yang berusia sekolah. Kedua, keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat yang kurang mampu dan pendidikan bisa di akses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dalam penyelenggaraan penerimaan murid baru tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), sistem berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yakni Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah MenengahKejuruan.

Upaya pemerataan pendidikan juga berwujud dalam bentuk kebijakan. Tekanan kebijakan sebagai proses adalah merujuk pada keterlibatan politik dalam mengenali suatu masalah yang memerlukan respon kebijakan

melalui tahapan formulasi dan implementasi, termasuk perubahan yang dilakukan selama perjalanannya. Selanjutnya kebijakan itu lebih dari dokumen atau naskah, tetapi kebijakan merupakan proses dan produk (Subarsono, 2004). Salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat pemerataan pendidikan adalah penetapan sistem zonasi yang tertera pada Permendikub nomor 44 tahun 2019 yang telah disempurnakan dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.

Permendikbud yang ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, yaitu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menekankan pada jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah. Penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan menggunakan sistem zonasi sudah tepat karena berlandaskan Pancasila. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan pendidikan yang berkualitas dan diharapkan mampu menyinergikan tripusat pendidikan yaitu sekolah, masyarakat dan keluarga untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat secara umum bahwa tanggung jawab Pendidikan tidak hanya di satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama.

Hal terpenting dari PPDB sistem zonasi adalah calon peserta didik bisa mendapatkan layanan pendidikan yang terdekat dari rumah atau tempat tinggalnya, jika dalam satu zona kelebihan kuota maka Dinas Pendidikan wajib mencarikan sekolah atau membuka rombongan tambahan, sehingga tidak ada anak yang tidak mendapatkan sekolah (Hasbullah & Anam, 2019). Dalam Permendikbud terbaru terkait PPDB, Pemerintah Pusat memberikan fleksibilitas daerah dalam menentukan alokasi untuk siswa masuk ke Sekolah melalui jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orangtua/wali, atau jalur lainnya (dapat berupa jalur prestasi). Persentasenya pun berubah menjadisebagai berikut :

Tabel 1. 1 Kebijakan Permendikbud Sebelum dan Sesudah di Perbarui

No.	Kebijakan PPDB No.51 Tahun 2018 – No. 20 Tahun 2019	Kebijakan PPDB No. 1 Tahun 2021
1	Jalur Zonasi Minimal 80%	Jalur Zonasi Minimal 50%
2	Tidak ada PPDB melalui jalur afirmasi	Jalur Afirmasi Minimal 15%
3	Jalur Perpindahan Orang Tua atau waliMaksimal 15%	Jalur Perpindahan Orang Tua atau waliMaksimal 15%
4	Jalur Prestasi Maksimal 15%	Jika ada sisa kouta, jalur prestasi dapatdibuka, bisa berdasarkan UN ataupun prestasi akademik dan non akademik lainnya. Jalur ini, demikian, Maksimal 30%

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.29 Tahun 2019 dan No. 1 Tahun 2021

Kebijakan menteri pendidikan mencetuskan perluasan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru yang awalnya 10% menjadi 20% sangat berguna bagi peserta calon didik baru untuk menentukan sekolah yang mereka inginkan dan untuk memperluas siswa yang berprestasi untuk memperoleh sekolah yang berkualitas. Di masa dicetuskannya sistem zonasi, terjadi beberapa kisah sedih seperti seorang siswa melakukan pembakaran beberapa piagam karena tidak diterima di sekolah yang diimpikannya karena wilayah rumahnya berjarak di luar dari zonasi yang ditentukan (Tiarasari, 2019)

Adanya masalah tersebut, peserta didik yang merasa mempunyai potensi lebih tidak mau bersekolah di sekolah tersebut dan memilih untuk bersekolah di sekolah favorit yang cenderung memiliki fasilitas yang memadai walaupun jauh dari tempat tinggal. Fenomena yang terjadi saat ini terdapat kesenjangan yang cukup kasat mata karena maraknya sekolah-sekolah negeri berlabel favorit atau unggulan hampir di setiap kabupaten atau kota. Input sekolah yang berasal dari kalangan eksklusif membuat

banyak hak istimewa yang diberikan bagi sekolah favorit seperti pemenuhan sarana dan prasarana yang lengkap untuk menunjang proses pembelajaran, tenaga pengajar pilihan yang kompeten dan profesional serta prioritas utama dalam pemberian akses untuk mengikuti berbagai perlombaan secara tingkat regional, nasional maupun internasional.

Pada kabupaten Pringsewu sistem zonasi mengikuti kebijakan Permendikbud No. 1 Tahun 2021 dalam upaya pemerataan PPDB dan sistem zonasi hanya berlaku pada Peserta Didik Baru. Untuk dapat mengakses atau mendaftarkan CPDB dalam sistem zonasi adalah CPDB harus membuat akun PPDB *online* sesuai daerah (namaerah.siapppdb.com), mengisi formulir dan melengkapi berkas persyaratan digital, mendapat bukti pengajuan akun berisi pin (token), setelah itu CPDB mengaktivasi akun di situs PPDB *online* selanjutnya mengubah token dengan kata sandi pribadi setelah memiliki akun CPDB dapat melakukan pendaftaran dengan cara mengunjungi situs PPDB *online*, masuk sesuai akun PPDB, memilih sekolah tujuan mendapatkan tanda bukti pendaftaran lalu mengikuti proses seleksi. Penerapan sistem zonasi, ditinjau dari sisi positifnya ialah siswa yang bermukim dekat dengan sekolah lebih mudah mendapatkan sekolah yang akan menerimanya tanpa harus mencari sekolah lain yang lebih jauh dari rumahnya.

Siswa yang berdomisili dekat dengan sekolah dapat mengefisiensi waktu. Siswa juga dapat menekan biaya pengeluaran seperti uang kos atau uang transportasi ke sekolah. Namun, sisi negatif dari adanya penerapan sistem zonasi di kabupaten Pringsewu adalah tidak ada lagi sekolah yang menonjol, dalam kata lain sekolah favorit. Hal ini merupakan dampak negatif karena sekolah menerima murid yang jarak dari rumah dan sekolah tersebut berdekatan, tidak peduli siswa tersebut pandai atau malas. Dengan begitu, mindset siswa akan berubah dari yang ambisius terhadap pelajaran menjadi lebih tidak peduli dengan akademik karena mereka berpikir mau rajin ataupun malas, mereka akan masuk ke sekolah yang paling dekat

dengan rumahnya (Tiarasari, 2019).

Sekolah juga diminta untuk memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal. Pada PPDB Tahun 2020/2021 terdapat 4 sistem pendaftaran yakni zonasi, afirmasi, sistem perpindahan orang tua/wali dan prestasi. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) Sistem pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui sistem zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui sistem afirmasi atau sistem prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan. Di SMP Negeri 2 Sukoharjo dan SMP Negeri 3 Pringsewu didapat sebuah data terkait berapa jumlah siswa yang diterima melalui sistem zonasi berikut tabel data:

Tabel 1. 2 Data Jumlah Penerimaan Siswa Jalur Zonasi Tahun 2022

	SMP N 2 Sukoharjo		SMP N 3 Pringsewu	
	Siswa	(%)	Siswa	(%)
Zonasi	115	60%	96	60%

Sumber: SMP N 2 Sukoharjo dan SMP N 3 Pringsewu

Melalui sistem zonasi, diharapkan pendidikan di kabupaten Pringsewu dapat berjalan dengan lebih baik lagi sesuai dengan keinginan pemerintah. Para guru juga berharap dengan adanya sistem zonasi tidak menyurutkan tekad siswa untuk terus belajar demi menggapai cita-citanya karena tidak peduli berada di sekolah manapun, apabila murid sudah memiliki tekad yang kuat dan fokus kepada harapan, maka apa yang diinginkan akan terwujud (Tiarasari, 2019). Sehingga dengan adanya sistem zonasi pendidikan akan merata, tidak adanya kesenjangan pendidikan di lingkungan masyarakat.

Akan tetapi dalam implementasinya di Kabupaten Pringsewu belum seluruh sekolah menerapkan penerimaan peserta didik baru secara *online*. Sehingga masih terdapat sekolah yang belum menerapkan sistem zonasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Evaluasi Sistem Zonasi Dalam Pemerataan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Pringsewu (Studi Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Pringsewu)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini ingin melihat:

Bagaimana evaluasi pelaksanaan sistem zonasi dalam pemerataan kualitas pendidikan di Kabupaten Pringsewu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran evaluasi penerapan sistem zonasi dalam pemerataan kualitas pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pringsewu.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
 - 1) Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.
 - 2) Menerapkan teori-teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek di lapangan serta untuk memperkaya ilmu pengetahuan bagi penulis terkhusus pada bidang administrasi negara

2. Secara Praktis

- 1) memberi pengetahuan mengenai evaluasi sistem zonasi dalam pemerataan kualitas pendidikan di kabupaten pringsewu .
- 2) Agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai evaluasi sistem zonasi dalam pemerataan kualitas pendidikan di kabupaten pringsewu dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga dapat digunakan sebagai suatu informasi yang ilmiah

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Kajian tinjauan literatur sebelumnya telah memudahkan penulis untuk secara sistematis mengidentifikasi langkah-langkah dalam hal konsep dan teori. Penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam menyelesaikan penelitian ini, dan juga menghindari plagiarisme dengan penelitian sebelumnya. Berikut penelitian terdahulu yang dirujuk oleh peneliti:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
Hiskia Renaldi Setiawan dan Tjitjik Rahayu “Evaluasi Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP Di Kota Surabaya”	Dari segi efektivitas, sistem zonasi PPDB SMP di Kota Surabaya cukup baik dilihat dari jumlah calon peserta didik melalui jalur kemitraan, namun terdapat kendala pada jalur inklusi karena belum berhasil dilaksanakan seperti beberapa sekolah tidak memiliki fasilitas yang memadai. Kriteria kecukupan dinilai cukup untuk menjawab permasalahan PPDB yang ada, yaitu terkait sekolah favorit dan pemerataan. Aspek reaktif tidak sesuai dengan kebutuhan siswa, yaitu banyak yang memberikan tanggapan negatif dari pada yang positif. Keakuratan aturan baru sangat baik untuk sekolah, dengan sekolah pinggiran kota dan perkotaan sejajar. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Cabang Surabaya perlu meninjau zonasi kawasan PPDB dan melakukan sosialisasi langsung dengan orang tua siswa.	Perbedaan penelitian yaitu pada lokasi Penelitian yang dilakukan oleh HiskiaRenaldi Setiawan dan Tjitjik Rahayu mengenai evaluasi sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMP di Kota Surabaya. Sedangkan penulis membahas mengenai evaluasi sistem zonasi dalam pemerataan kualitas pendidikan tingkat SMP di Kabupaten Pringsewu, serta dalam menganalisis data menggunakan teori model evaluasi CIPP oleh Stufflebeam (Wirawan, 2011)

<p>Nur Halimah</p> <p>“Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Di SMP Negeri Tangerang Selatan (Study kasus SMPN 03 dan SMPN 17 Tangerang Selatan)”</p>	<p>Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di SMP Negeri Tangerang Selatan dijabarkan dalam beberapa aspek, yaitu: Aspek konteks bahwa kebijakan ini perlu adanya penambahan jumlah sekoah negeri atau bekerjasama dengan sekolah swasta sebagai pilihan zonasi; Aspek input, ketersediaan fasilitator, buku pedoman dan mekanisme PPDB sistem zonasi sudah terpenuhi; Aspek proses, pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi sudah berjalan sesuai dengan mekanisme dan jadwal yang telah ditentukan. Meskipun belum terlaksananya target jumlah peserta didik yang diterima; Aspek prodak, kebijakan PPDB sistem zonasi di SMPN Tangerang Selatan sudah diimplementasikan sesuai pada prinsip kebijakan yaitu objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan atau non-diskriminatif meskipun memang belum mencapai tujuan kebijakan.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Nur Halimah di tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Tangerang Selatan. Sedangkan lokasi penelitian penulis di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Pringsewu.</p>
<p>Irna Sulistiani, Abizar Isna, dan Sedy Noviko</p> <p>“Evaluasi Implementasi Sistem Zonasi Pendidikan (Studi Kasus di SMP Negeri 2 dan 7 Purwokerto)”</p>	<p>SMP N 2 Purwokerto sebagai sekolah yang dianggap favorit dan SMP N 7 sebagai sekolah yang dianggap non favorit telah patuh terhadap <i>policy guideline</i> yang berlaku, terdapat faktor pendukung yaitu desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah serta terdapat faktor penghambat yaitu masih adanya <i>blank spot</i> dan keinginan dari masyarakat untuk masuk sekolah favorit. Temuan penelitian yaitu SMP Negeri 7 Purwokerto sebagai sekolah non favorit belum mampu menjaring anak-anak dengan kualitas yang baik dikarenakan kalah dengan kuota 15% jalur prestasi sehingga anak yang mempunyai nilai yang baik lebih memilih mendaftar di sekolah yang dianggap favorit.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Irna Sulistiani, Abizar Isna, dan Sedy Noviko berlokasi di SMP Negeri 2 dan 7 Purwokerto, serta teori analisis data yang digunakan yaitu teori evaluasi implementasi dari Ripley dan Franklin (Kusumanegara, 2010) Sedangkan penulis menggunakan teori model evaluasi CIPP oleh Stufflebeam (Wirawan, 2011) serta lokasi penelitian di tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Pringsewu</p>

Sumber: Diolah peneliti (2022) dari (Setiawan dan Rahaju, 2021), (Halimah, 2020) (Sulistiani dkk., 2020).

Penulis menggunakan beberapa jurnal yang dijadikan sebagai referensi pada tabel 3 tersebut untuk memperkaya hasil penelitian. Dari ketiga penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan

penulis buat yaitu memiliki fokus melakukan evaluasi sistem zonasi sekolah. Dari ketiga penelitian terdahulu yang memiliki beberapa perbedaan seperti tertulis pada tabel, maka penelitian ini bersifat baru karena melihat sistem zonasi dalam pemerataan kualitas pendidikan di Kabupaten Pringsewu.

2.2 Evaluasi Kebijakan Publik

Konsep Evaluasi

Menurut Lester dan Stewart (Agustino, 2008) menjelaskan bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Anderson memandang Evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Sedangkan Stufflebeam (Arikunto, 2004), mengungkapkan bahwa Evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.

Wirawan (2012) menjelaskan bahwa evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Lebih lanjut Dunn (Subarsono, 2011) menjelaskan ada tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi, yaitu:

- a) Evaluasi semu, Artinya, metode evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid tentang hasil kebijakan tanpa mempersoalkan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut bagi individu, kelompok, atau masyarakat.
- b) Evaluasi formal, yakni adalah Metode evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi

yang dapat dipercaya dan valid tentang hasil kebijakan berdasarkan tujuan program kebijakan yang secara formal diidentifikasi oleh pembuat kebijakan.

- c) Evaluasi proses keputusan terotitis, Artinya, metode evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid tentang hasil kebijakan yang jelas diinginkan oleh berbagai pemangku kepentingan.

Pendapat William Dunn yang dikutip (Suratman, 2017) , ecara universal kalau penilaian bisa disamakan dengan diagnosis(*appraisal*), pemberian angka(*rating*), serta evaluasi(*assesment*). Dalam makna khusus penilaian berkaitan dengan penciptaan data menimpa nilai ataupun khasiat hasil kebijaksanaan. Penilaian kebijakan merupakan sesuatu aktivitas buat memperhitungkan tingkatan pencapaian tujuan kebijakan. Sebaliknya Parsons menarangkan riset penilaian kebijakan merupakan gimana kebijakan publik bisa ditaksirkan, diaudit, dinilai serta dikontrol. Riset tentang penilaian kebijakan terdiri dari memperhitungkan apakah kebijakan publik menggapai tujuan (Anggara, 2014).

Secara umum Dunn (Nugroho, 2009) menjelaskan mengenai indikator-indikator dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan yakni sebagai berikut:

- a) Efektifitas; apakah hasil yang di idamkan sudah dicapai?
Berkenaan dengan sesuatu alternatif menggapai hasil(akibat) yang diharapkan, ataupun menggapai tujuan dari diadakan indakan. Daya guna, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis senantiasa diukur dari unit produk ataupun layanan dan nilai moneter.
- b) Efisiensi; seberapa banyak usaha dibutuhkan buat menggapai hasil yang di idamkan?
Berkenaan dengan jumalh usaha yang dibutuhkan buat

menciptakan tingkatan daya guna tertentu. Efisiensi umumnya ditetapkan lewat perhitungan bayaran per unit produk ataupun layanan. Kebijakan yang menggapai daya guna paling tinggi dengan bayaran terkecil dinamakan efektif.

- c) Kecukupan; seberapa jauh pencapaian hasil yang di idamkan membongkar permasalahan?

Kecukupan dalam kebijakan publik bisa dikatakan tujuan yang sudah dicapai telah dialami memadai dalam bermacam perihal. Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh sesuatu tingkatan daya guna dan alternatif kebijakan bisa memuaskan kebutuhan, nilai serta menuntaskan permasalahan yang terjalin..

- d) Pemerataan; apakah hasil manfaat didistribusikan dengan menyeluruh kepada kelompok- kelompok yang berbeda?

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria pemerataan(equity) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial. Serta kesesuaian pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok- kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan ialah kebijakan yang akibat dan usaha secara adil didistribusikan.

- e) Responsivitas; apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, ataupun nilai kelompok- kelompok tertentu?

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas, berarti anggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, maupun nilai kelompok- kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat lewat asumsi warga dalam wujud sokongan ataupun berbentuk penolakan buat menjawab penerapan kebijakan, sehabis akibat kebijakan telah

mulai bisa dialami.

Kriteria responsivitas berarti sebab analisis yang bisa memuaskan seluruh kriteria yang lain(daya guna, efisiensi, kecukupan, kesamaan), kebijakan dikira masih kandas bila belum menjawab kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari terdapatnya kebijakan. Oleh sebab itu, kriteria responsivitas gambaran nyata kebutuhan, preferensi, serta nilai dari kelompok tertentu terhadap kriteria daya guna, efisiensi, kecukupan serta kesamaan. Ketepatan; apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

- f) Ketetapan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai hasil dari alternatif tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan substansi tujuan, bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi yang sudah dipaparkan bisa ditarik kesimpulan kalau penilaian kebijakan ialah sesuatu aktivitas yang dicoba dalam rangka memandang implementasi setelah itu melaksanakan evaluasi terhadap jalannya sesuatu kebijakan apakah kebijakan telah terealisasi dengan baik ataupun belum, ada pula tujuan dari penilaian yakni buat mengenali apakah kebijakan tersebut layak buat dilanjutkan ataupun tidak.

Subarsono (2011) (Akbar & Mohi, 2018) menjelaskan bahwa evaluasi memiliki beberapa tujuan yakni:

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan
Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan
Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.

- c. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan
Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
- d. Mengukur dampak suatu kebijakan
Pada tahap lebih lanjut, ditunjukkan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
- e. Untuk mengetahui apabila terjadi penyimpangan
Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- f. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang
Tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Model-Model dalam Evaluasi

Evaluasi program juga dikenal berbagai macam model evaluasi program. Seperti yang dijelaskan oleh Wirawan (2012) dalam (Akbar & Mohi, 2018), yang menjelaskan mengenai beberapa bentuk/model evaluasi yakni:

a) Model Evaluasi Berbasis Tujuan

Model Evaluasi Berbasis ialah model penilaian tertua. Model penilaian ini ialah proses memastikan hingga seberapa besar tujuan pembelajaran sebetulnya bisa dicapai. Model Penilaian Berbasis Tujuan dirancang serta dilaksanakan dengan proses selaku berikut::

1) Mengidentifikasi tujuan

Mengenalinya serta mendefinisikan tujuan ataupun objektif intervensi, layanan dari program yang tercantum dalam rencana program. Objektif program setelah itu diformulasikan dalam indikator-indikator kuantitas serta mutu yang diukur.

2) Merumuskan tujuan menjadi indikator-indikator

Evaluators merumuskan tujuan program jadi indikator- penanda kuantitatif serta kualitatif yang bisa diukur.

3) Mengembangkan metode dan instrumen untuk menjangkau data

Evaluators memastikan apakah hendak memakai tata cara kuantitatif ataupun kualitatif ataupun kombinasi. Meningkatkan instrumen buat menjangkau informasi. Tipe instrumen bergantung pada tata cara yang dipergunakan.

4) Memastikan program telah berakhir dalam mencapai tujuan Layanan, intervensi dari program telah dilaksanakan dan ada indikator mencapai pencapaian tujuan, pengaruh atau perubahan yang diharapkan.

5) Menjangkau dan menganalisis data/informasi mengenai indikator-indikator program Menjangkau dan menganalisis data/mengenai semua indikator program.

6) Kesimpulan

Mengukur hasil pencapaian program, ataupun pengaruh intervensi ataupun pergantian yang diharapkan dari penerapan program serta menyamakan dengan objektif yang direncanakan dalam rencana program buat memastikan apakah terjalin ketimpangan. Hasilnya salah satu dari berikut:

- Program dapat mencapai objektifnya sepenuhnya
- Program dapat mencapai sebagian dari objektifnya antara 50 % - 99,9%
- Program mencapai objektifnya di bawah 50 %
- Program gagal mencapai objektifnya
- Mengambil keputusan mengenai program.

Keputusan dapat berupa:

- Jika program bisa menggapai tujuannya seluruhnya, bisa jadi program dilanjutkan ataupun dilaksanakan di wilayah

lain bila lebih dahulu cuma dicoba di wilayah tertentu.

- Bisa pula terjalin bila program sukses seluruhnya serta warga yang dilayani tidak membutuhkan lagi layanan program aka program dihentikan. Misalnya, bila program-program pengentasan kemiskinan sukses membuat mereka yang miskin jadi tidak miskin lagi, hingga program tersebut bisa dihentikan.
- Jika program nyatanya kandas hendak namun masih dibutuhkan layanannya oleh sebagian besar warga, hingga program dianalisis pemicu kegagalan serta setelah itu dibesarkan ataupun dimodifikasi.

b) **Model Evaluasi Bebas Tujuan**

Model Evaluasi Bebas Tujuan (*Goal Free Evaluation Model*) ialah penilaian terkait pengaruh yang sebetulnya, objektif yang mau dicapai oleh program. Evaluator melakuakn penilaian buat mengenali pengaruh yang sebetulnya dari pembedahan program. Pengaruh program yang sebetulnya bisa jadi berbeda ataupun lebih banyak ataupun lebih luas dari tujuan yang dinyatakan dalam program tersebut. Sesuatu program bisa memiliki 3 tipe pengaruh, ialah:

- Pengaruh sampingan yang negatif
- Pengaruh positif yang ditetapkan oleh tujuan program
- Pengaruh sampingan positif.

Model evaluasi tanpa target sangat luas dan menimbulkan masalah bagi evaluator dalam hal usaha, biaya, dan waktu evaluasi. Oleh karena itu, sebelum merancang evaluasi, evaluator harus mengantisipasi, mengidentifikasi, dan mendefinisikan apa saja dampak negatif program, apa saja dampak positif yang sejalan dengan tujuan program, dan apa saja dampak positif yang berada di luar program. tujuan. Dengan demikian, upaya, biaya dan waktu yang diperlukan untuk merencanakan dan melaksanakan penilaian dapat dihitung.

c) **Model Evaluasi Formatif dan Sumatif**

Model penilaian formatif serta sumatif mulai dicoba kala kebijakan program ataupun proyek mulai dilaksanakan(penilaian formatif) serta hingga akhir penerapan program(penilaian sumatif).

1) Evaluasi formatif

Istilah evaluasi formatif adalah evaluasi yang dirancang dan dilakukan untuk memperbaiki tujuan, terutama dalam mengembangkannya. Sepanjang implementasi kebijakan, program atau proyek, beberapa penilaian formatif dapat dilakukan sesuai kebutuhan atau untuk mengevaluasi kontrak kerja.

- Untuk mengukur hasil pelaksanaan program secara periodik.
- Untuk mengukur apakah klien/partisipan bergerak kearah tujuan yang direncanakan.
- Untuk mengukur apakah sumber-sumber telah dipergunakan sesuai dengan rencana.
- Untuk menentukan koreksi apa yang harus dilakukan jikaterjadi penyimpangan.
- Untuk menentukan koreksi apa yang harus dilakukan jikaterjadi penyimpangan.

2) Evaluasi Sumatif

Evaluasi sumatif dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program. Evaluasi ini mengukur kinerja akhir objek evaluasi. Evaluasi sumatif berupaya untuk mengukur indikator-indikator sebagai berikut:

- Hasil dan pengaruh layanan atau intervensi program
- Mengukur persepsi klien mengenai layanan dan intervensi program
- Menentukan *cost effectiveness*, *cost efficiency*, dan *cost benefit* program evaluasi sumatif dilakukan dengan

tujuan untuk.

- Menentukan sukses keseluruhan pelaksanaan Program
- Menentukan apakah tujuan umum dan tujuan khusus program telah tercapai.
- Menentukan apakah klien mendapatkan manfaat dari program
- Menentukan komponen yang mana yang paling efektif dalam program.
- Melakukan keluaran yang tidak diantisipasi dari program
- Menentukan *cost* dan *benefit program*
- Mengkomunikasikan temuan evaluasi kepada para pemangku kepentingan.
- Mengambil keputusan apakah, program harus dihentikan, dikembangkan, atau dilaksanakan ditempat lain.

d) **Model Evaluasi Responsif**

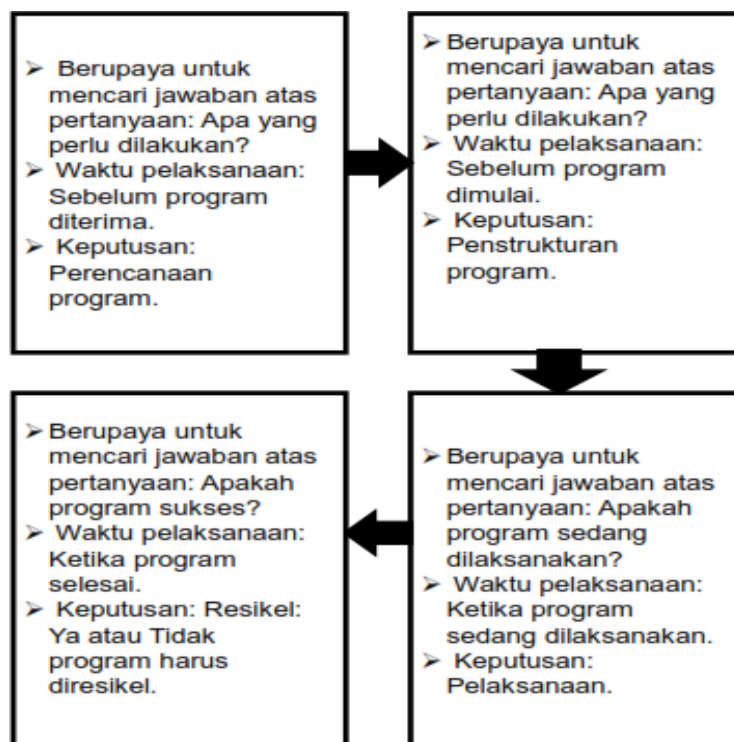
Evaluasi disebut responsif jika memenuhi tiga kriteria: (1) lebih berorientasi secara langsung kepada aktifitas program daripada tujuan program; (2) merespon kepada persyaratan kebutuhan informasi dari audiens, dan (3) perspektif nilai-nilai yang berbeda dari orang-orang dilayani dilaporkan dalam kesuksesan dan kegagalan dari program.

e) **Model Evaluasi *Context, Input, Process, dan Product (CIPP)***

Evaluasi adalah proses menggambarkan (*depicting*), memperoleh dan menyajikan informasi untuk membantu mengevaluasi alternatif keputusan. Mendeskripsikan berarti menspesifikasikan, mendefinisikan, dan menjelaskan untuk memfokuskan informasi yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan. Akuisisi mengacu pada pengumpulan, pengorganisasian, dan analisis informasi melalui

pengukuran dan statistik, dan penyediaan mengacu pada sintesis informasi untuk memenuhi kebutuhan evaluasi pemangku kepentingan evaluasi dengan sebaik-baiknya.

Stufflebeam (Wirawan, 2012), Model evaluasi CIPP adalah kerangka komprehensif untuk memandu evaluasi formatif dan sumatif objek proyek, program, orang, produk, institusi dan sistem. Model dikonfigurasi untuk digunakan oleh penilaian internal oleh organisasi penilaian, penilaian mandiri oleh tim proyek, atau penyedia layanan individual yang dikontrak atau penilai eksternal. Model CIPP mencakup empat jenis penilaian, menurut Stufflebeam (Wirawan, 2011) dalam (Akbar & Mohi, 2018), yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Evaluasi Model CIPP

Sumber: (Akbar dan Mohi, 2018)

1) Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*)

Evaluasi konteks untuk menjawab pertanyaan: apa yang perlu dilakukan? Evaluasi ini mengidentifikasi dan menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasari disusunnya

suatu program.

2) Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*)

Evaluasi input untuk menemukan jawaban atas pertanyaan: apa yang harus dilakukan? Penilaian ini mengidentifikasi masalah, aset, dan peluang untuk membantu pengambil keputusan menentukan tujuan, prioritas, dan untuk membantu kelompok pengguna yang lebih luas menilai tujuan, prioritas, dan manfaat program.

3) Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)

Evaluasi proses bertujuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut: Apakah prosedur sedang diterapkan? Evaluasi ini dirancang untuk memahami bagaimana kinerja program untuk membantu perencana mengembangkan kampanye mereka, dan kemudian untuk membantu komunitas pengguna yang lebih luas mengevaluasi program dan menjelaskan manfaatnya.

4) Evaluasi Produk (*Product Evaluation*)

Evaluasi produk berusaha menjawab pertanyaan: Apakah berhasil? Penilaian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menangkap keluaran dan manfaat jangka pendek dan jangka panjang yang direncanakan dan tidak direncanakan.

2.3 Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi

Sistem zonasi merupakan jalur masuk atau penerimaan peserta didik baru disekolah negeri. Sistem zonasi disediakan bagi peserta didik yang berada di dalam satu lokasi yang dekat dengan sekolah selama minimal satu tahun dengan dibuktikan KTP atau kartu keluarga dan siswa tidak perlu lagi melalui ujian masuk. Sistem zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun

tetangga ataupun rukun masyarakat yang dilegalisir oleh lurah/ kepala desa ataupun pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan kalau partisipan didik yang bersangkutan sudah berdomisili sangat pendek 1(satu) tahun semenjak diterbitkannya pesan penjelasan domisili.

Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan calon partisipan didik baru yang didasarkan pada zona tempat tinggal calon partisipan didik dengan posisi sekolah yang di seleksi, dengan syarat:

- 1) Registrasi dilaksanakan dengan sistem online di tiap- tiap satuan pembelajaran opsi awal dengan memakai no tes nasional SMP/ MTs ataupun yang sederajat..
- 2) Sitem Zonasi tiap satuan pembelajaran menerima minimum 90% dari calon partisipan didik baru dari kuota yang ditetapkan..
- 3) Zona ditetapkan bersumber pada kecamatan tempat satuan pembelajaran terletak serta ditambah dengan segala kecamatan yang berbatasan langsung dengan kecamatan yang dimaksud..
- 4) Dalam perihal sistem zonasi bila jumlah pendaftar melebihi energi tampung satuan pembelajaran, hingga hendak diadakan perankingan bersumber pada jarak tempat tinggal calon partisipan didik baru terhadap satuan pembelajaran yang diseleksi dari jarak terdekat sampai jarak yang terjauh..
- 5) Untuk calon partisipan didik baru yang berdomisili di wilayah perbatasan Kabupaten/ Kota dan bersebelahan dengan salah satu SMA Negara di Kabupaten/ Kota tersebut diperbolehkan buat mendaftar selaku calon partisipan didik baru di sekolah tersebut(Penerimaan PPDB Tahun 2019- 2020).
- 6) Untuk calon partisipan didik baru yang berdomisili di wilayah perbatasan Provinsi Lampung dan bersebelahan dengan salah satu SMA Negara di Provinsi Lampung diperbolehkan buat mendaftar selaku calon partisipan didik baru di sekolah tersebut..

Zonasi ataupun rayonisasi ataupun pembagian bersumber pada daerah kerap dicoba dalam sebagian bidang atas tujuan tertentu serta mendapatkan khasiat tertentu. Ada pula tujuan serta khasiat zonasi secara

universal merupakan:

a) Meningkatkan Kualitas

Dengan menggunakan zonasi, hasil pekerjaan bisa lebih berkualitas sesuai potensi kawasannya.

b) Pemerataan

Ada kalanya zonasi dilakukan bertujuan sebagai pemerataan. Seperti misalnya zonasi pada sistem PPDB agar pendidikan menjadi merata.

c) Memudahkan Pengelolaan

Zonasi ataupun rayonisasi terbuat supaya mempermudah pengelolaannya jadi lebih pas serta efektif. Jalan sistem zonasi ialah jalan penerimaan siswa bersumber pada zona tempat tinggal. Departemen Pembelajaran serta Kebudayaan (Kemendikbud), Permendikbud No 1 Tahun 2021 memberlakukan jalan penerimaan ini. PPDB tahun 2020 bisa diiringi calon siswa yang Sekolah Bawah, Sekolah Menengah Awal, Sekolah Menengah Atas. Pemakaian sistem zonasi buat penerimaan siswa baru ialah salah satu jalan buat dapat diterima di sekolah. Pelaksanaan sistem zonasi sesungguhnya menyasar siswa baru supaya mendaftar sekolah cocok tempat tinggal

2.3.1 Program Zonasi

Program ialah statement yang berisi kesimpulan dari sebagian harapan ataupun tujuan yang silih tergantung serta silih terpaut, buat menggapai sesuatu sasaran yang sama. Umumnya sesuatu program mencakup segala aktivitas yang terletak di dasar unit administrasi yang sama, ataupun sasaran- sasaran yang silih tergantung serta silih memenuhi, yang seluruhnya wajib dilaksanakan secara bertepatan ataupun berentetan. Program kerap berhubungan dengan perencanaan, persiapan, serta desain ataupun rancangan. Desain berasal dari bahasa Inggris ialah dari kata *decine*. Jadi desain dalam perspektif pendidikan merupakan rencana pendidikan. Rencana pendidikan diucap pula dengan program pembelajaran (Muhaimin et

al., 2011)

Sistem Zonasi mempunyai Program buat melaksanakan percepatan pembangunan pembelajaran yang menyeluruh, bermutu, serta berkeadilan selaku suatu sinergi serta integrasi pelayanan pembangunan pembelajaran pengelolaan sistem pembangunan pembelajaran yang terkumpul secara vertikal mulai dari satuan pembelajaran, desa/ kelurahan, kecamatan/ distrik, kabupaten/ kota, Provinsi, serta tingkatan nasional; serta membangun strategi pengelolaan pembelajaran yang berkesinambungan pada tiap tipe serta jenjang pembelajaran mulai dari Pendidikan anak usia dini, pembelajaran bawah, serta pembelajaran menengah.

Selain itu Sistem Zonasi mempunyai program Intervensi. Intervensi bisa dalam wujud program kenaikan mutu guru, kenaikan fasilitas prasarana, revisi proses belajar mengajar, revisi aktivitas kesiswaan serta telah mendekati Standar Nasional Pembelajaran (SNP). Program zonasi mempunyai 4 jalan Zonasi bersumber pada dibawah ini:

1) Jalur Zonasi

Jalan zonasi diperuntukkan untuk partisipan didik yang berdomisili di dalam daerah zonasi yang diresmikan Pemerintah Wilayah. Jalan zonasi kuota untuk anak penyandang disabilitas. Jalan Zonasi ditujukan bersumber pada alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan sangat pendek 1(satu) tahun semenjak bertepatan pada registrasi PPDB. Kartu Keluarga bisa ditukar dengan pesan penjelasan domisili dari rukun orang sebelah ataupun rukun masyarakat yang dilegalisir oleh lurah/ kepala desa ataupun pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan kalau partisipan didik yang bersangkutan sudah berdomisili sangat pendek 1(satu) tahun semenjak diterbitkannya pesan penjelasan domisili. Sekolah memprioritaskan partisipan didik yang mempunyai kartu keluarga ataupun pesan penjelasan domisili dalam satu daerah kabupaten/ kota yang sama dengan

Sekolah asal.

2) Jalur Afirmasi

Jalan afirmasi sebagaimana diartikan dalam diperuntukkan untuk partisipan didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak sanggup. Partisipan didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak sanggup sebagaimana diartikan dibuktikan dengan fakta keikutsertaan partisipan didik dalam program penindakan keluarga tidak sanggup dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Wilayah. Partisipan didik yang masuk lewat jalan afirmasi ialah partisipan didik yang berdomisili di dalam serta di luar daerah zonasi Sekolah yang bersangkutan. Fakta keikutsertaan dalam program penindakan keluarga tidak sanggup dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Wilayah sebagaimana diartikan harus dilengkapi dengan pesan statment dari orang tua/ wali partisipan didik yang melaporkan bersedia diproses secara hukum apabila teruji memalsukan fakta keikutsertaan dalam program penindakan keluarga tidak sanggup dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Wilayah.

3) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Perpindahan tugas orang tua/ wali sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan pesan penugasan dari lembaga, lembaga, kantor, maupun industri yang mempekerjakan. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/ wali dapat digunakan buat anak guru.

4) Jalur prestasi

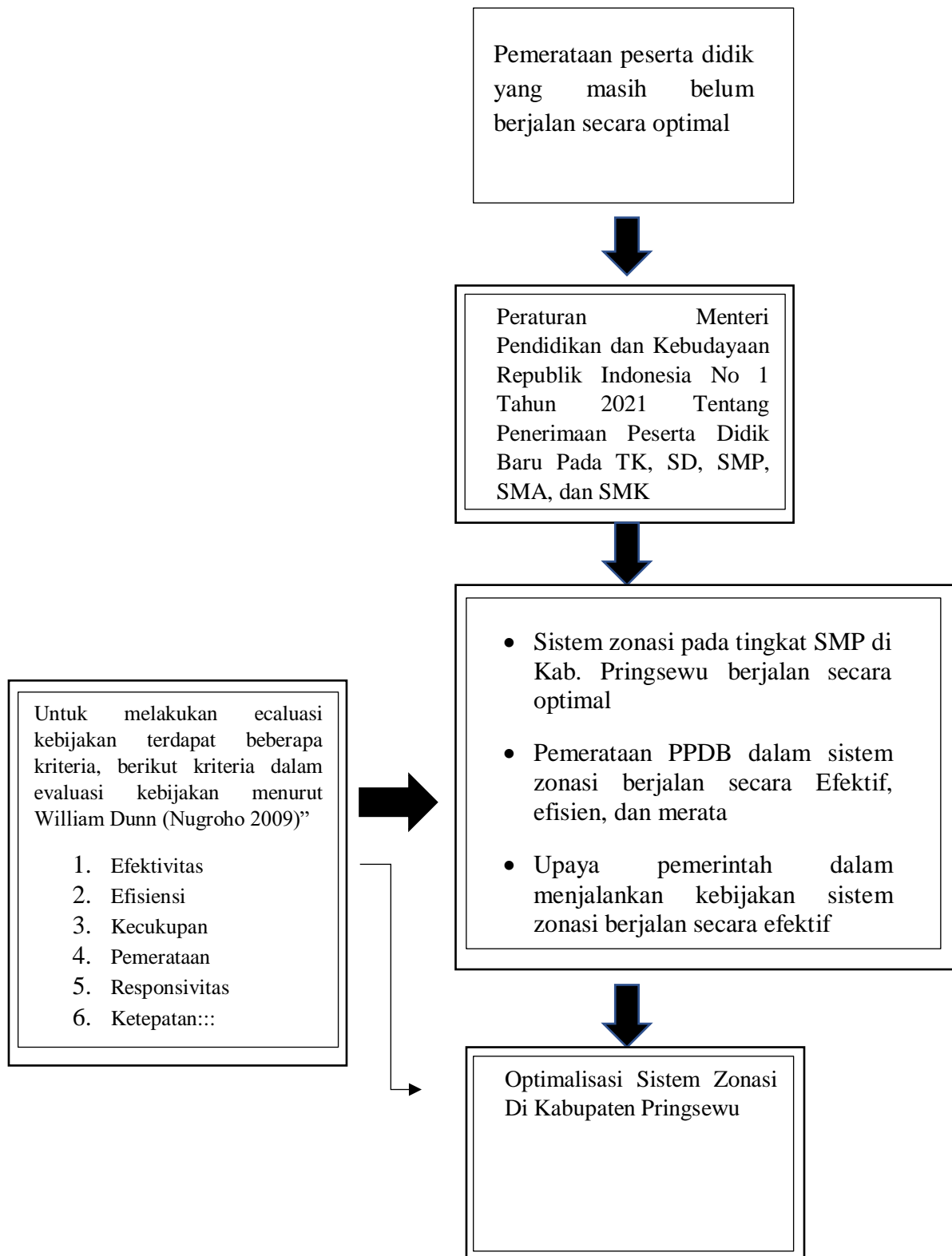
Jalan prestasi sebagaimana diartikan ditetapkan bersumber pada: nilai Tes Sekolah(UN) ataupun hasil perlombaan serta penghargaan di bidang akademik ataupun non- akademik pada tingkatan internasional, tingkatan nasional, tingkatan provinsi, serta/ ataupun tingkatan kabupaten/ kota. Fakta atas prestasi sebagaimana diartikan wajib diterbitkan sangat pendek 6(6) bulan serta sangat lama 3(3) tahun semenjak bertepatan pada

registrasi PPDB.

2.4 Kerangka Pikir

Pemerintah Kabupaten Pringsewu, menerapkan sebuah kebijakan mengenai sistem zonasi pada PPDB. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD, SM, SMA, dan SMK, kebijakan ini salah satu upaya nyata dari pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan ini pemerintah mengeluarkan aturan baru untuk calon peserta didik baru, khusus mengenai sistem zonasi yang mana calon peserta didik baru jika ingin masuk/melanjutkan sekolahnya diwajibkan mengikuti aturan sistem zonasi dimana dihitung jarak rumah peserta didik baru dengan jarak sekolah.

Dalam sistem ini, sekolah yang diselenggarakan pemerintah wajib menerima paling sedikit 50% dari jumlah keseluruhan peserta yang diterima untuk calon peserta didik yang berdomisili pada radius terdekat. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Banyak orang tua murid yang cenderung merasa sistem zonasi ini malah mempersulit calon siswa untuk melanjutkan sekolah. Hal ini dikarenakan pihak sekolah akan lebih mengutamakan calon peserta didik yang radius tempat tinggalnya dekat dari sekolah daripada yang berprestasi dan memiliki nilai tinggi.



Gambar 2. 2 Kerangka Fikir
Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2022)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Alasan menggunakan metode kualitatif adalah karena ingin memverifikasi evaluasi sistem zonasi dalam pemerataan kualitas Pendidikan di Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan metode penelitian ini, peneliti berusaha menganalisis dan mengkaji secara mendalam penerapan Sistem Zonasi pada penerimaan siswa baru Kabupaten Pringsewu untuk mengetahui berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan dengan menggunakan indikator atau standar penilaian kebijakan publik.. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada *postpositivisme*, yaitu memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang *holistik* atau utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala yang bersifat interaktif (Sugiyono, 2016).

Penulis memilih menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan suatu penjelasan yang mendalam berkaitan dengan ucapan, tulisan serta tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, organisasi tertentu dalam suatu kontak setting tertentu yang dikaji dalam sebuah sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Hal ini untuk mendapatkan hasil yang baik maka penulis harus mengumpulkan data dan fakta yang terjadi atas fenomena yang akan peneliti teliti dari berbagai sumber lalu melihatnya dengan teori yang sudah ada dan bisa mendapatkan hasil yang

komprehensif

3.2 Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut juga dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang bersifat umum. Dalam penelitian kualitatif, penentu fokus lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi

yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Fokus ini dimaksudkan untuk membatasi studi penelitian kualitatif guna memilih data yang relevan dan yang tidak relevan. Pembatasan penelitian ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi masalah yang akan dipecahkan.

Penulis memiliki fokus evaluasi sistem zonasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Pringsewu, dengan menggunakan teori William Dunn (Nugroho, 2009) yang melihat beberapa kriteria dalam evaluasi kebijakan publik yaitu:

a) Efektivitas

Berkenaan dengan sesuatu alternatif menggapai hasil(akibat) yang diharapkan, ataupun menggapai tujuan dari diadakan aksi. Daya guna, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis senantiasa diukur dari unit produk ataupun layanan dan nilai moneter.

b) Efisiensi

Berkenaan dengan jumlah usaha yang dibutuhkan buat menciptakan tingkatan daya guna tertentu. Efisiensi umumnya ditetapkan lewat perhitungan bayaran per unit produk ataupun layanan. Kebijakan yang menggapai daya guna paling tinggi dengan bayaran terkecil dinamakan efektif.

c) Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas serta alternatif kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, nilai dan menyelesaikan masalah yang terjadi.

d) Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan publik bisa dikatakan memiliki makna dengan keadilan yang diberikan serta diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria pemerataan(*equity*) erat hubungannya dengan rasionalitas sah serta sosial. Dan kesesuaian pada

distribusi akibat serta usaha antara kelompok- kelompok yang warga. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan merupakan kebijakan yang akibat serta usaha secara adil didistribusikan.

e) Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik bisa dimaksud selaku reaksi dari sesuatu kegiatan, berarti asumsi sasaran kebijakan publik atas pelaksanaan sesuatu kebijakan. Keberhasilan kebijakan bisa dilihat lewat asumsi warga dalam wujud sokongan ataupun berbentuk penolakan buat menjawab penerapan kebijakan, sehabis akibat kebijakan telah mulai bisa dialami.

f) Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai ataupun harga dari tujuan program serta pada kuatnya anggapan yang melandasi tujuan- tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai buat menseleksi beberapa alternatif buat dijadikan saran dengan memperhitungkan hasil dari alternatif tersebut ialah opsi tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan substansi tujuan, bukan metode ataupun instrumen buat merealisasikan tujuan tersebut

3.3 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yaitu di Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, serta SMP Negeri 2 Sukoharjo dan SMP Negeri 3 Pringsewu yang terdapat di Kabupaten Pringsewu. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena ingin mengetahui apakah Sistem Zonasi pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Pringsewu sudah efektif dalam implementasinya. Menjadikan SMPN 2 Sukoharjo dan SMPN 3 Pringsewu sebagai lokasi penelitian diantaranya karena sekolah tersebut memiliki letak geografis yang berbeda, dan SMPN 3 Pringsewu sebelumnya merupakan sekolah unggulan sedangkan SMPN 2 Sukoharjo sekolah yang bukan tergolong unggulan dilingkungan masyarakat sebelum adanya sistem zonasi. Peneliti ingin mengetahui sejauh mana keberhasilan implementasi sistem zonasi sekolah di Kabupaten Pringsewu dari kedua

sampel sekolah tersebut.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data merupakan kata-kata dan data-data sebagai penambahandalam melengkapi data penelitian. Data jika diklasifikasikan berdasarkan sumbernya dapat dikelompokkan kedalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Berikut jenis data menurut sumbernya:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek riset. Dalam perihal ini, periset mendapatkan informasi ataupun data langsung dengan memakai instrumen- instrumen yang sudah diresmikan. Pengumpulan data primer ialah bagian internal dari proses riset serta yang kerap kali dibutuhkan buat tujuan pengambilan keputusan. Peneliti menggunakan data primer yang berasal dari hasil wawancara mendalam dan observasi yang berkaitan dengan sistem zonasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Pringsewu. Dengan sumber data yang diperoleh dari informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang ada dalam bermacam wujud. Biasanya informasi sekunder berbentuk fakta, catatan ataupun laporan historis yang sudah tersusun dalam arsip baik yang diterbitkan ataupun yang tidak dipublikasikan. Data ini digunakan untuk mendukung data primer yang telah diperoleh. Jenis data sekunder dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah jurnal, dokumen arsip, dan artikel yang berkaitan dengan sistem zonasi sekolah.

3.4.2 Sumber Data

Berdasarkan jenis data, maka sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan. Sedangkan jenis data sekunder diperoleh dari sumber dokumen. Berikut merupakan sumber dari jenis data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Informan

Informan ialah orang-orang yang berhubungan serta mempunyai data tentang fokus riset yang hendak dibahas. Riset ini dicoba dengan mengumpulkan data dari sebagian informan yang tiap-tiap informan bagi periset sudah mewakili terhadap fokus riset. Informan ialah sumber data primer dalam riset kualitatif, berikut merupakan data informan dalam penelitian ini:

Tabel 3.1 Data Informan

No.	Nama Informan	Jabatan
1	Bapak Heri Iswahyudi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pringsewu
2	Bapak Duwi Dian Saputra	Operator sekolah SMPN 3 Pringsewu
3	Bapak Yoga Saputra	Operator sekolah SMPN 2 Sukoharjo
4	Ibu Risnawati	Guru SMPN 2 Sukoharjo
5	Ibu Sariana	Guru SMPN 3 Pringsewu
6	Ibu Sumaryati	Wali Murid dari Murid Siswa SMPN 2 Sukoharjo
7	Bapak Sugiyanto	Wali Murid dari Murid Siswa SMPN 3 Pringsewu
8	Muhammad Dahlan	Siswa SMPN 3 Pringsewu
9	Ratna Permatasari	Siswa SMPN 2 Sukoharjo

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2022)

b. Dokumen-dokumen

Dokumen merupakan arsip yang berkaitan dengan topik riset. Informasi ini umumnya telah diolah ataupun ditabulasikan oleh kantor serta pihak yang bersangkutan. Dokumen ialah sumber informasi sekunder dalam riset kualitatif. Berikut ialah dokumen- dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem zonasi sekolah di Kabupaten Pringsewu yang dijadikan sumber informasi dalam riset ini:

1. Keputusan Bupati Pringsewu Nomor 278 tentang Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Pringsewu Tahun 2021/2022.
2. Profil Sekolah
3. Data Data Panitia PPDB

Tabel 3. 2 Data Dokumen-Dokumen

Dokumen	Data Yang Didapat
Keputusan Bupati	Daya Tampung Sekolah Jumlah Sekolah yang menerapkan sistem zonasi
Profil Sekolah	Visi, Misi, Tujuan Fasilitas Jumlah Siswa
Data-Data Panitia PPDB	Jumlah Siswa Yang Diterima Jalur Zonasi

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2022)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi ialah sesuatu proses yang lingkungan, sesuatu proses yang tersusun dari bermacam proses biologis serta psikologis, dan metode

yang sangat efisien buat mengenali apa yang dicoba orang dalam konteks tertentu, pola rutinitas serta pola interaksi dari kehidupan mereka sehari - hari (Sugiyono, 2016). Penelitian ini melakukan observasi dengan mendeskripsikan penerapan sistem zonasi sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pringsewu. Penulis akan melakukan observasi langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu serta SMP Negeri 2 Sukoharjo dan SMP Negeri 3 Pringsewu untuk dapat dijadikan sumber data utama bagi penelitian ini.

- a) Melakukan pengamatan terhadap kondisi fisik SMPN 2 Sukoharjo dan SMPN 3 Pringsewu
- b) Melakukan pengamatan terhadap aktivitas evaluasi sistem zonasi dalam pemerataan kualitas pendidikan di kabupaten pringsewu (Studi SMPN 2 Sukoharjo dan SMPN 3 Pringsewu)

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud untuk mendapatkan informasi tertentu dan dilakukan oleh dua pihak. Menurut Esterberg (Sugiyono, 2016), wawancara merupakan pertemuan antara 2 orang buat bertukar data serta ilham lewat tanya jawab sehingga bisa dikonstruksikan arti dalam sesuatu topik tertentu. Dalam wawancara periset pula memakai perlengkapan bantu semacam perekam suara, novel, serta material lain yang bisa menolong penerapan wawancara jadi mudah.. Menurut Sudarwan (Djaelani, 2013), ada sebagian tipe wawancara yang bisa digunakan bersumber pada strukturnya, pada riset kualitatif ada 2 tipe wawancara, yaitu:

- 1) Wawancara tertutup adalah wawancara yang berfokus pada sesuatu topik tertentu serta universal yang dibantu dengan pedoman wawancara yang terbuat secara detail.
- 2) Wawancara terbuka adalah periset mempunyai kebebasan buat berdialog secara luas serta mendalam dalam aktivitas wawancara.

wawancara yang digunakan didalam penelitian ini wawancara yang digunakan yaitu wawancara terbuka, karena peneliti ingin memiliki

kebebasan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari informasi menimpa hal-hal berbentuk gambar, tulisan, foto, catatan, novel, serta sebagainya. Dokumentasi digunakan selaku sumber informasi sebab dalam banyak perihal, dokumen selaku sumber informasi dimanfaatkan buat menguji, menafsirkan, apalagi buat meramalkan. Mengkaji sesuatu dokumen dicoba dengan metode menyelidiki sesuatu informasi yang berasal dari dokumen, *file*, ataupun catatan serta hal-hal lain yang bisa didokumentasikan. Lewat kajian dokumen ini hendak memudahkan periset serta bila terjalin kesalahan gampang buat ditukar sebab narasumbernya tidak berganti. Buat memudahkan kerja di lapangan, perihal awal yang dicoba ialah membuat pedoman..

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis interaktif merupakan langkah pertama dalam menganalisis data dengan mengumpulkan data, kemudian menyusun secara sistematis, data yang sudah disusun kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan foto, menarik kesimpulan dari hasil analisis, setelah itu mempresentasikan hasil penelitian, Miles and Huberman (Sugiyono, 2016). Berikut penjelasannya:

a) Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Dengan demikian data yang diperoleh banyak dan bervariasi. Pada penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan observasi atau

pengamatan pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan sistem zonasi sekolah. Peneliti juga melakukan wawancara mendalam kepada informan yang sudah ditentukan oleh peneliti. Serta melakukan dokumentasi berupa foto pada setiap kegiatan yang dilakukan, baik saat observasi maupun wawancara.

b) Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang berarti, dicari tema serta polanya. Dengan demikian informasi yang sudah direduksi membagikan penafsiran yang lebih jelas serta memudahkan periset buat melaksanakan pengumpulan informasi selanjutnya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus sepanjang proses riset berlangsung berikutnya membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugusan-gugusan serta menulis memo. Pada sesi ini periset memilah-milah informasi yang berkaitan serta diperlukan dalam riset ini. Setelah itu periset memisahkan data yang tidak butuh serta memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan penelitian.

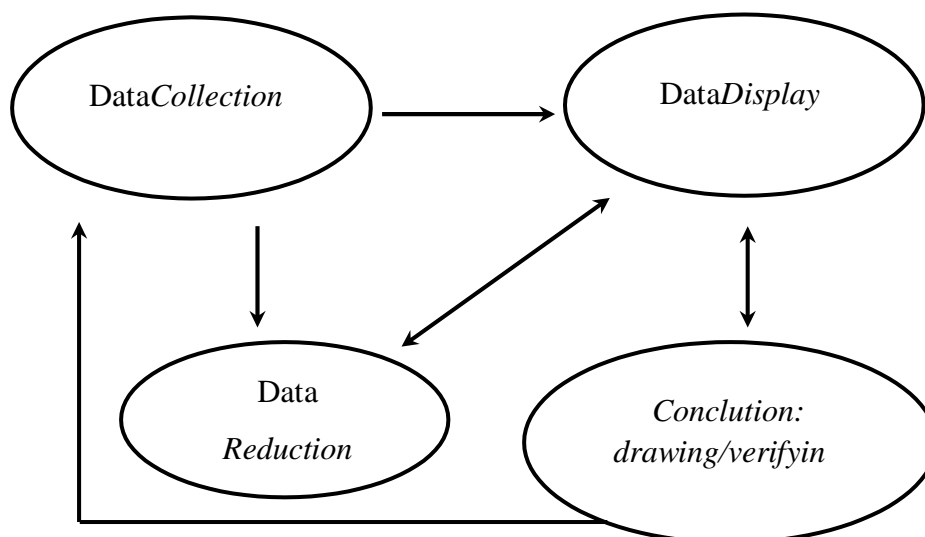
c) Penyajian Data (Display Replay)

Dengan menyajikan data maka dapat memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau sebagian besar dari penelitian, yang paling sering digunakan dalam penyajian data kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Penelitian ini penyajian datanya diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, foto atau gambar, tabel, dan sejenisnya untuk menjelaskan topik yang diangkat. Dengan begitu maka data lebih terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dalam wawancara terhadap informan yang memahami terkait penelitian ini.

d) Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)

Langkah keempat dalam analisis data kualitatif merupakan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Kesimpulan dini yang dikemukakan masih bertabat sedangkan serta hendak berganti apabila tidak

ditemui bukti- bukti yang kokoh yang menunjang pada sesi pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada sesi ini didukung oleh bukti- bukti yang valid serta tidak berubah- ubah dikala periset kembali ke lapangan mengumpulkan data, hingga kesimpulan yang dikemukakan ialah kesimpulan kredibel. Riset ini menarik kesimpulan dengan mengambil intisari dari rangkaian hasil riset yang bersumber pada tipe data primer serta sekunder, sehingga diperoleh jawaban tentang efektivitas sistem zonasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Pringsewu. Berikut bagan model interaktif dalam analisis data.



Gambar 3. 1 Komponen dalam Analisis Data Kualitatif/Model Interaktif

Sumber: Sugiyono (2016)

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dicoba buat meyakinkan apakah riset yang dicoba betul- betul ialah riset ilmiah sekalian buat menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam riset kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, serta *confirmabilit* (Sugiyono, 2016).

1. Uji credibility (kredibilitas)

atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan

oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan. Pengecekan keabsahan data yang ada pada penelitian ini yaitudengan Triangulasi teknik. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi teknik, yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Adapun triangulasi yang ditempuh dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi dari sumber data yang sama dan serempak sehingga derajat kepercayaan data dapat valid.

2. Transferability (validitas eksternal)

Kriteria ini berbeda dengan validitas eksternal dari nonkualitatif. Konsep validitas itu menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku tau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi itu (Moelong, 2018).

Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfermasih dapat dipertanggungjawabkan.

3. Dependability (reliabilitas)

Uji reliabilitas dilaksanakan untuk menilai apakah proses penelitian kualitatif bermutu atau tidak, dengan mengecek apakah peneliti sudah cukup hati-hati, apakah peneliti membuat kesalahan dalam mengkonseptualisasikan rencana penelitiannya, pengumpulan data, dan pengintepretasiannya. Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhanproses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam

melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. Confirmability (obyektifitas)

Uji obyektivitas dilaksanakan dengan menganalisa apakah hasil penelitian disepakati banyak orang atau tidak. Penelitian dikatakan obyektif jika disepakati banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab empat mengenai evaluasi sistem zonasi pada PPDB di Kabupaten Pringsewu yang dianalisis menggunakan teori William Dunn (Nugroho 2009) bahwa evaluasi kebijakan publik memiliki kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- a) Efektifitas; pada indikator efektifitas penerapan sistem zonasi masih belum dapat dikatakan efektif dikarenakan dari segi fasilitas sarana dan prasarana pendukung pembelajaran masih belum rata sehingga masih banyak para siswa yang memilih untuk bersekolah ditempat yang jauh dari tempat tinggal asalkan memiliki fasilitas dan kualitas yang lebih unggul.
- b) Efisiensi; dari indikator efisiensi PPDB sistem zonasi hanya efisien pada sisi waktu bagi panitia, namun pada penerapan pelaksanaannya masih jauh dari kata efisien dikarenakan masih banyak wali murid yang tidak cakap teknologi sehingga kesulitan dalam mengakses dan belum meratanya jaringan internet di kabupaten pringsewu, sehingga dalam indikator ini PPDB sistem zonasi belum dapat dikatakan efisien
- c) Kecukupan; indikator kecukupan PPDB sistem zonasi sudah memenuhi indikator kecukupan dikarenakan dukungan oleh data pembagian zona wilayah, memudahkan calon peserta didik untuk bersekolah di sekolah negeri yang tidak jauh dari tempat tinggal, serta wali peserta didik yang terus berharap kebijakan ini tetap diterapkan
- d) Pemerataan; sistem zonasi dinilai belum memenuhi indikator

pemerataan karena Pada penelitian ini sistem zonasi dinilai belum memenuhi indikator pemerataan karena hanya 18 sekolah yang menerapkan sistem zonasi dari 27 sekolah negeri tingkat SMP yang ada.

- e) Responsivitas; dalam penelitian ini indikator responsivitas memperoleh respon yang positif karena masyarakat juga mengharapkan anak-anaknya bersekolah di sekolah negeri yang memiliki jarak dekat dari tempat tinggalnya.
- f) Ketepatan; PPDB sistem zonasi telah tepat pelaksanaannya sesuai dengan pasal 13 Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah namun didalam pelaksanaannya masih terdapat dampak positif dimana memudahkan calon siswa untuk dapat diterima di sekolah yang dekat dengan tempat tinggal dan dampak negatif yang menyebabkan berkurangnya semangat siswa untuk menjadikan sekolahnya sebagai sekolah terbaik.

Melalui penjabaran kesimpulan diatas berdasarkan evaluasi sistem zonasi dengan analisis menggunakan teori William dunn (Nugroho, 2009) didapat kesimpulan bahwa sistem zonasi dalam upaya pemerataan kualitas Pendidikan di Kabupaten Pringsewu belum dapat dikatakan optimal dikarenakan dari beberapa indikator penelitian hanya terdapat tiga indikator yang memenuhi kategori sehingga PPDB sistem zonasi pada Kabupaten Pringsewu belum dapat dikatakan optimal dalam pelaksanaannya dikarenakan masih perlu banyak perbaikan dan pembaharuan dalam pelaksanaannya

5.2 Saran

Melihat implementasi sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Pringsewu yang sudah efektif untuk ditepakan, efisiensi dari sisi waktu panitia. Hanya saja peneliti melihat masih ada beberapa hal yang perlu untuk dikembangkan, seperti:

- a) Diharapkan Dinas Pendidikan di Kabupaten pringsewu menetapkan kebijakan terhadap pihak sekolah yang ada di kabupaten pringsewu untuk mengoptimalisasikan sistem zonasi dengan melakukan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih baik, agar sistem zonasi yang ada di kabupaten pringsewu bisa berjalan secara merata dalam akses pendidikannya.
- b) Dinas Pendidikan diharapkan mengupayakan pemerataan jaringan internet di Kabupaten Pringsewu agar seluruh sekolah dapat menerapkan sistem zonasi secara merata serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan cara pendaftaran sekolah secara daring, hal ini untuk memudahkan panitia PPDB serta wali dari calon peserta didik saat pendaftaran dimulai.
- c) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pringsewu dengan sekolah-sekolah yang ada dapat membentuk suatu program atau kebijakan untuk meningkatkan minat siswa yang diterima melalui jalur zonasi untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (2nd ed.). Alfabeta.
- Akbar, F., & Mohi, K. (2018). Studi Evaluasi Kebijakan. In *Ideas Publishing* (Vol. 1, Issue 69).
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia.
- Djaelani, A. R. (2013). Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif. *Majalah Ilmiah Pawiyatan*, 20(1), 82–92.
- Hasbullah, & Anam, S. (2019). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (Smpn) Di Kabupaten Pamekasan. *Reformasi*, 9(2), 112. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1413>
- Keputusan Bupati Pringsewu Nomor 278 tentang Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Pringsewu Tahun 2021/222.
- Kemendikbud: Sistem Zonasi Mempercepat Pemerataan di Sektor Pendidikan <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/06/kemendikbud-sistem-zonasi-mempercepat-pemerataan-di-sektor-pendidikan> (diakses tanggal 25 Mei 2022, pukul 20.00)
- Moelong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (revisi ; C). Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin, Suti'ah, & Prabowo, S. L. (2011). *Manajemen Pendidikan: Aplikasi Dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah* (3rd ed.). Prenadamedia Group.
- Nugroho, R. (2009). *Public policy : teori kebijakan, analisis kebijakan, proses*

kebijakan, perumusan, implementasi, evaluasi, revisi, risk management dalam kebijakan publik, kebijakan sebagai the fifth estate, metode penelitian kebijakan. Elex Media Komputindo.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

PPDB SMA Online di Pringsewu Terkendala Sistem
<https://medialampung.disway.id/amp/45555/ppdb-sma-online-di-pringsewu-terkendala-sistem> (diakses tanggal 13 Maret 2023, Pukul 18.00 WIB)

Pro dan Kontra Kebijakan Zonasi di Kabupaten Pringsewu
<https://www.kompasiana.com/azzahrarizqilla7002/605c3f378ede482ec9071322/pro-dan-kontra-kebijakan-zonasi-di-kabupaten-pringsewu> (diakses tanggal 13 Maret 2023, Pukul 17.22 WIB)

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.

Suratman. (2017). *Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Capiya.

Tiarasari, R. (2019, June 28). Viral, Siswa Berprestasi di Pekalongan Bakar Piagam karena Tak Diterima di Sekolah Impiannya. *TribunPalu.Com*.